BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
Jl. Baji Minasa No.2, Makassar 90126
Telepon/WA: (0411) 879043/0852 11111 533
Email: bpom_makassar@pom.go.id / bbpomdimakassar@gmail.com

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (JANUARI-SEPTEMBER) 2026

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
JANUARI																				
1	23 Januari 2026	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Mahasiswa	A. Pertanyaan Umum 1. Bagaimana setruktur kepemimpinan BPOM kota makassar? 2. Bagaimana tugas dan kewenangan BPOM Kota Makassar dalam pengawasan obat tradisional yang beredar di masyarakat, khususnya melalui media online?	PENELITIAN	V			V			V	Dikabulkan sepenuhnya		3 Februari 2026	3 Februari 2026	0	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				3. Sejauh mana BPOM berperan dalam mengawasi penjualan obat tradisional di platform e-commerce seperti Shopee? B. Bentuk dan Mekanisme Pengawasan 1.Ada berapakah permasalahan yang telah di tangani BPOM makassar dalam penjualan obat tradisional yang dijual melalui shopee.? 2. Bagaimana mekanisme pengawasan BPOM terhadap obat tradisional yang dijual secara online? 3. Apakah BPOM memiliki sistem atau metode khusus untuk memantau penjualan obat tradisional di Shopee? 4. Bagaimana kerja sama BPOM dengan													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				pihak Shopee dalam menindak penjualan obat tradisional ilegal? C. Penindakan dan Penegakan Hukum 1. Apa saja bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan dalam penjualan obat tradisional secara online? 2. Bagaimana prosedur penindakan terhadap pelaku usaha yang menjual obat tradisional tanpa izin edar BPOM? 3. Sanksi apa saja yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut? D. Faktor Penghambat 1. Apa saja faktor yang menghambat BPOM dalam melakukan pengawasan obat														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				tradisional yang dijual melalui Shopee? 2. Apakah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi mempengaruhi efektivitas pengawasan? 3. Bagaimana tantangan BPOM dalam menghadapi pelaku usaha online yang menggunakan identitas tidak jelas? E. Upaya dan Solusi 1. Upaya apa yang telah dilakukan BPOM untuk meningkatkan pengawasan obat tradisional online? 2. Bagaimana peran edukasi masyarakat dalam menekan peredaran obat tradisional ilegal? 3. Apa harapan BPOM terhadap pemerintah dan platform e-commerce														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				dalam mengatasi permasalahan ini?														
FEBRUARI																				
. NIHIL																				
MARET																				
2	9 Maret 2026	[redacted]				1. Bagaimana peran dan kewenangan BBPOM Kota Makassar dalam mengawasi peredaran produk kosmetik, khususnya yang dipasarkan melalui media sosial? 2. Apakah menurut bapak, influencer dapat dianggap sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab hukum jika mempromosikan kosmetik ilegal? 3. Apakah menurut	Untuk memperoleh data penelitian dalam penyusunan skripsi	V			V			V	Dikabulkan sepenuhnya		25 Maret 2026	25 Maret 2026	0	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				bapak, influencer yang mempromosikan kosmetik tanpa izin edar dapat dikategorikan sebagai pihak yang “turut memperdagangkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen? Mengapa? 4. Apakah influencer dapat dimintai pertanggungjawaban administratif atau pidana jika terbukti mengiklankan produk kosmetik ilegal? Jika ya, seperti apa dan berdasarkan ketentuan apa? 5. Apakah BBPOM Kota Makassar pernah menemukan atau menangani kasus influencer yang													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				mempromosikan kosmetik ilegal? jika pernah, bagaimana proses penanganannya? 6. Berdasarkan pengalaman BBPOM, apakah influencer umumnya mengetahui apakah produk yang mereka promosikan sudah memiliki izin edar atau belum? 7. jika konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik ilegal yang dipromosikan influencer, bagaimana cara atau mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan oleh konsumen? 8. Apakah influencer dapat turut dimintai tanggung jawab ganti														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				rugi apabila terbukti lalai memastikan legalitas produk sebelum endorsement? 9. dalam menangani kasus seperti ini, apakah bbpom bekerja sama dengan instansi lain? jika iya, kerja sama tersebut dilakukan dengan siapa dan dalam bentuk apa? 10. selama melakukan pengawasan, apa kendala terbesar yang dihadapi bbpom dalam melindungi masyarakat dari peredaran kosmetik ilegal yang dipromosikan melalui influencer? 11. Menurut bapak, apakah undang-												

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				undang perlindungan konsumen saat ini sudah cukup untuk menjerat influencer yang mempromosikan kosmetik ilegal, atau diperlukan regulasi khusus? 12. apakah terdapat peningkatan kasus peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial dalam beberapa tahun terakhir? 13. Jika konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik ilegal yang dipromosikan influencer, siapa saja yang menurut BBPOM dapat dimintai tanggung jawab berdasarkan Pasal 19 UUPK?												

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
3	9 Maret 2026	[redacted]			Maha siswa	Ingin meminta data laporan tahunan 2025 terkait skincare ilegal di kota Makassar	Tugas kuliah	V			V			V	Dikabul kan sepenu hnya		17 Maret 2026	17 Maret 2026	0	-
APRIL																				
NIHIL																				
MEI																				
4	4 Mei 2026	[redacted]			Maha siswa	ehubungan dengan penelitian yang sedang saya lakukan dengan judul “Collaborative Governance dalam Pengawasan Kosmetik di Kota Makassar”, bersama ini saya mengajukan beberapa pertanyaan wawancara sebagai berikut: *PENGAWASAN MUTU PRODUK* 1. BPOM melakukan	penelitian Skripsi	V			V			V	Dikabul kan sepenu hnya		6 Mei 2026	6 Mei 2026	0	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				pengawasan terhadap peredaran kosmetik di Indonesia. Menurut Bapak/Ibu, Seberapa penting upaya pengawasan kosmetik dalam melindungi masyarakat? 2. Bagaimana lingkup pelaksanaan pengawasan kosmetik yang dilakukan oleh BPOM Makassar? 4. Apakah BPOM juga melakukan pengawasan kosmetik secara online? Jika iya, bagaimana mekanismenya? 5. Apa kendala utama yang dihadapi BPOM dalam melakukan pengawasan														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				peredaran kosmetik di Kota Makassar? 6. Bagaimana upaya BPOM dalam meningkatkan efektivitas pengawasan kosmetik di Kota Makassar? *REGULASI* 1. Dalam hal produksi dan distribusi kosmetik, Bagaimana kondisi kepatuhan pelaku usaha kosmetik di kota Makassar saat ini terhadap ketentuan yang berlaku? 2. Bagaimana prosedur dan langkah penindakan yang dilakukan oleh BPOM terhadap pelaku usaha kosmetik yang tidak memenuhi														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				ketentuan yang berlaku? 3. Apa dasar hukum/regulasi yang menjadi acuan BPOM dalam melakukan pengawasan kosmetik? *KERJASAMA LINTAS SEKTOR* 1. Penelitian ini mengkaji terkait kolaborasi aktor pentahelix. kelima aktor tersebut adalah pemerintah, sektor swasta, komunitas masyarakat, dan media. 1) Bagaimana bentuk kerja sama BPOM dengan instansi pemerintah dalam pengawasan kosmetik di Kota Makassar? Instansi pemerintah mana saja yang terlibat												

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				dalam kolaborasi tersebut? 2) Bagaimana bentuk kerja sama BPOM dengan sektor swasta dalam pengawasan kosmetik di Kota Makassar? 3) Bagaimana bentuk kerja sama BPOM dengan akademisi dalam pengawasan kosmetik di Kota Makassar? 4) Bagaimana bentuk kerja sama BPOM dengan komunitas masyarakat dalam pengawasan kosmetik di Kota Makassar? 5) Bagaimana bentuk kerja sama BPOM dengan media dalam pengawasan														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				kosmetik di Kota Makassar? 2. Apa kendala utama/hambatan yang dihadapi BPOM dalam menjalin kolaborasi dengan masing-masing pihak tersebut? Pihak tersebut adalah pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, media. 3. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana peran masing-masing pihak tersebut (pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, media) dalam mendukung pelaksanaan pengawasan kosmetik? 4. Sejak kapan kerja sama dengan berbagai pihak tersebut mulai														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				dijalankan, dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? 5. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kolaborasi dengan berbagai pihak ini membantu meningkatkan efektivitas pengawasan kosmetik di Kota Makassar? 6. Bagaimana upaya strategi yang dilakukan BPOM untuk memperkuat kerja sama dengan pihak-pihak terkait kedepannya?														
5	6 Mei 2026				Polri	Wawancara fungsi dan peran personil laboratorium dalam pengungkapan perkara Kosmetik dan	Ujian tesis	V			V			V	Dikabulkan sepenuhnya		12 Mei 2026	12 Mei 2026	0	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				permintaan data pengujian dan penanganan kasus kosmetik TIE														
6	6 Mei 2026				Maha siswa	1. Data jumlah penindakan terhadap peredadan produk kosmetik ilegal di wilayah Makassar dan bentuk sanksi yang diberikan oleh BPOM Makassar 2. ?Apakah penindakan lebih banyak berasal dari hasil pengawasan rutin atau laporan dari masyarakat atau BPOM memantau penjualan di e-commerce wilayah Makassar seperti Shopee kemudian di tindak secara langsung?	tujuan penggunaan informasi ini untuk mendukung penyusunan skripsi. Data dan informasi termasuk digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti terkait peredaran produk	V			V			V	Dikabulkan sepenuhnya		22 Mei 2026	22 Mei 2026	0	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				3. ?Bagaimana prosedur penindakan yang dilakukan BPOM terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal, serta apakah terdapat perbedaan mekanisme penindakan antara toko konvensional dan penjualan melalui platform e-commerce di wilayah Makassar? 4. ?Bagaimana mekanisme pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal di Makassar dan platform e-commerce seperti Shopee? 5. ?Menurut BPOM Makassar, apakah pengawasan di e-commerce lebih sulit	kosmetik ilegal serta mengeta hui tindakan nyata BPOM terhadap peredara n produk kosmetik ilegal. Judul skripsi "Perlindu ngan Hukum Terhadap Konsume n Atas Penjuala n Produk Kosmetik Ilegal di Platform Shopee".											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				dibandingkan dengan toko konvensional?														
7	6 Mei 2026				MAHASISWI	Data hasil pengawasan dan evaluasi penandaan produk kosmetika oleh BPOM, yang mencakup informasi terkait kelengkapan label, nomor notifikasi, komposisi, tanggal kedaluwarsa, identitas produsen, serta kesesuaian klaim produk dengan ketentuan yang berlaku.	Sebagai bahan penelitian skripsi untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat kepatuhan penandaan produk kosmetika berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024	V			V			V	Dikabulkan sepenuhnya		29 Mei 2026	29 Mei 2026	0	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]																		
JUNI																				
8	11 Juni 2026	[redacted]			Maha siswa	1. jumlah pengaduan konsumen terhadap kosmetik ilegal dikab.bone tahun 2025 dan januari sampai maret 2026 2. jumlah temuan kosmetik ilegal dikab.bone tahun 2025 dan januari sampai maret 2026	sebagai data untuk observasi awal untuk proposal penelitian dengan judul " impleme ntasi peraturan bpom no. 12 tahun 2023 tentang pengawa san pembuat an dan peredara n kosmetik (studi kasus di loka pom	V			V			V	Dikabul kan sepenu hnya		24 Juni 2026	24 Juni 2026	0	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]					dikab.bone)"													
JULI																				
9	24 Juni 2026	[redacted]			Mahasiswa	PEDOMAN WAWANCARA BPOM MAKASSAR Data: Nama : NIP/NIK : Jabatan : Tanggal Wawancara : 1. Bagaimana peran BPOM dalam menangani kasus kosmetik yang mengandung merkuri? 2. Bagaimana mekanisme penemuan dan penindakan terhadap produk kosmetik berbahaya? 3. Siapa saja pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus	Untuk data penelitian skripsi dengan judul skripsi " PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA KESEHATAN PRODUK KOSMETIK SKINCARE BERMERKURI TERHADAP KERUGI	V			V			V	Dikabulkan sepenuhnya		9 Juli 2026	9 Juli 2026	0	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				kosmetik bermerkuri? 4. Bagaimana BPOM berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses pidana? 5. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam kasus tersebut? 6. Apa saja bukti yang biasanya digunakan untuk membuktikan adanya kandungan merkuri dalam kosmetik? 7. Apa saja hambatan yang dihadapi BPOM dalam pengawasan kosmetik bermerkuri? 8. Apakah terdapat kendala dalam proses penindakan atau penyidikan? 9. Bagaimana kendala dalam pembuktian di laboratorium atau di pengadilan? 10. Apakah pelaku	AN KONSUMEN BERDASARKAN UU NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)”												

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				usaha sulit ditindak? Mengapa? 11. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kosmetik bermerkuri? 12. Apa upaya yang dilakukan BPOM untuk mengatasi hambatan tersebut? 13. Bagaimana langkah pencegahan yang dilakukan agar kasus serupa tidak terulang? 14. Apa saran untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum?														
10	1 Juli 2026				Maha siswa	1. Dalam pelaksanaan pengawasan kosmetik di Kota Makassar, apakah BPOM pernah melakukan pertemuan atau forum bersama yang melibatkan pihak pemerintah, pelaku	Tambahan informasi dalam penyusunan skripsi	V			V			V	Dikabulkan sepenuhnya		16 Juli 2026	16 Juli 2026	0	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				usaha kosmetik, dan masyarakat? 2. Apakah forum tersebut berupa sosialisasi, diskusi, konsultasi, evaluasi, atau bentuk lainnya? Kapan dan Dimana forum tersebut dilaksanakan? Siapa saja pihak yang terlibat dalam forum tersebut? 3. Apa tujuan utama dari pertemuan atau forum yang melibatkan BPOM, pelaku usaha, dan masyarakat tersebut? 4. Apakah ada regulasi yang dihasilkan dari forum tersebut? 5. Sejak kapan BPOM Melakukan Kolaborasi pengawasan dengan Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan? 6. Sejak kapan BPOM Melakukan Kolaborasi													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*					Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak				Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan						
		[redacted]				pengawasan dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Korwas PPNS)? 7. Sejak Kapan BPOM melakukan kolaborasi dengan PERKOSMI? 8. Apakah masyarakat umum pernah dilibatkan dalam suatu forum kolaborasi? 9. Bagaimana upaya BPOM dalam membangun kepercayaan dengan pelaku usaha kosmetik dan masyarakat dalam proses pengawasan kosmetik? 10. Apakah terdapat kendala atau tantangan dalam membangun kepercayaan antara BPOM, pelaku usaha, dan Masyarakat? Bagaimana BPOM mengatasi kendala tersebut?													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*					Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak				Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan						
		[redacted]				11. Bagaimana BPOM memastikan bahwa pelaku usaha memahami bahwa pengawasan dilakukan sebagai bentuk perlindungan masyarakat, bukan hanya sebagai tindakan penindakan? 12. Bagaimana bentuk komitmen BPOM dalam menjalankan kolaborasi pengawasan kosmetik bersama pelaku usaha dan masyarakat? 13. Bagaimana BPOM mendorong pelaku usaha agar ikut berkomitmen memenuhi ketentuan kosmetik, seperti izin edar, keamanan produk, dan persyaratan lainnya? 14. Apakah pelaku usaha dan masyarakat terlibat dalam proses													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				evaluasi atau pemberian masukan terhadap kegiatan pengawasan kosmetik yang dilakukan BPOM? 15. Bagaimana BPOM membangun pemahaman bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat terkait pentingnya pengawasan kosmetik? Apakah masih terdapat perbedaan pemahaman antara BPOM, pelaku usaha, dan masyarakat terkait aturan kosmetik? Misalnya terkait izin edar, keamanan produk, atau kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan 16. Dari proses kolaborasi yang telah dilakukan, apa hasil atau perubahan sementara yang													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				terlihat dalam pengawasan kosmetik di Kota Makassar? Misalnya peningkatan kepatuhan pelaku usaha, peningkatan pemahaman masyarakat, atau perubahan lainnya. 17. Apakah forum atau kerja sama yang dilakukan menghasilkan kesepakatan tertentu antara BPOM, pelaku usaha, dan masyarakat? Jika ada, bentuk kesepakatannya seperti apa? 18. Sebelum adanya kolaborasi antara BPOM, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan kosmetik, apakah sudah terdapat regulasi atau aturan yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				kosmetik? Regulasi apa yang menjadi dasar tersebut? 19. Setelah adanya proses kolaborasi, apakah terdapat regulasi, pedoman, kesepakatan, atau aturan baru yang dihasilkan untuk mendukung pengawasan kosmetik? 20. Apakah terdapat aturan khusus yang mengatur bentuk kerja sama atau kolaborasi antara BPOM, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan kosmetik?													
11	13 Juli 2026				Maha siswa	Berdasarkan data yang saya terima dari informasi BPOM Makassar, jumlah perkara yang telah ditindaklanjuti secara Pro Justitia adalah sebagai berikut: * Tahun 2023: 5	Untuk keperlua n penelitian skripsi yang membah as terkait perlindun gan	V			V			V	Dikabul kan sepenu hnya		14 Juli 2026	14 Juli 2026	0	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				perkara * Tahun 2024: 1 perkara * Tahun 2025: 3 perkara Selain itu, pada informasi yang saya peroleh juga disebutkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 7 (tujuh) kasus kosmetik hasil operasi penindakan dan yang ditindaklanjuti secara hukum/Pro Justitia sebanyak 6 (enam) perkara. Adapun sanksi yang disebutkan antara lain pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan perampasan barang bukti untuk dimusnahkan. Berdasarkan data tersebut, saya masih memerlukan beberapa penjelasan agar tidak terjadi	hukum terhadap konsume n atas penjuala n produk kosmetik ilegal di Platform Shopee. Data dan informasi dari BPOM diperluka n sebaga bahan penelitian dan bahan penduku ng dalam penyusu nan skripsi. Informasi digunaka n semata-mata untuk kepentin												

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				kesalahan dalam memahami dan menginterpretasikan data, yaitu: 1. bagaimana data yang benar mengenai jumlah penindakan perkara terkait kosmetik ilegal pada tahun 2025 karena terdapat dua jumlah perkara berbeda yang terjadi pada tahun 2025 ? 2. Terkait sanksi yang disebutkan berupa pidana penjara 3 bulan dan perampasan barang bukti untuk dimusnahkan, apakah sanksi tersebut berlaku untuk seluruh perkara atau terdapat perbedaan sanksi pada masing-masing perkara (kosmetik ilegal)? jika tidak, mohon informasi mengenai bentuk sanksi yang dijatuhkan pada	gan akademik dan tidak untuk tujuan komersil													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				masing-masing perkara (kosmetik ilegal) yang ditindak oleh BPOM Makasar. 3. Apakah BPOM dapat memberikan informasi mengenai nomor perkara kosmetik ilegal yang ditindaklanjuti secara hukum/Pro Justitia pada tahun tersebut?														
AGUSTUS																				
12	10 Agustus 2026	[redacted]			Mahasiswa	1. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2023, tanaman Cannabis (ganja) dan turunannya dilarang keras sebagai bahan baku atau BTP. Bagaimana bentuk pengawasan rutin BPOM terhadap kemungkinan penyusupan zat narkotika (seperti THC, sabu, dll.) pada produk makanan olahan dan minuman	sebagai bahan penunjang dalam skripsi penelitian yang berjudul "ANALISIS HUKUM PEREDARAN NARKOTIKA YANG TERDAP	V			V			V	Dikabulkan sepenuhnya		27 Agustus 2026	27 Agustus 2026	0	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				kemasan di pasaran? 2. Bagaimana prosedur pengujian sampel produk pangan olahan atau minuman kemasan oleh BPOM jika terindikasi mengandung zat narkotika? Apakah BPOM memiliki alat uji khusus yang dapat mendeteksi zat narkotika dalam campuran adonan makanan/minuman? 3. Jika ditemukan produk makanan/minuman olahan yang terbukti positif mengandung narkotika di lapangan, bagaimana bentuk sanksi administratif (pencabutan izin edar, penarikan produk, dll.) yang diterapkan oleh BPOM berdasarkan PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan?	AT PADA PRODUK MAKANAN OLAHAN DAN MINUMAN KEMASAN"												

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				4. Bagaimana mekanisme koordinasi dan pembagian kewenangan penindakan antara BPOM dengan instansi penegak hukum seperti BNNP dan Kepolisian ketika menangani kasus tindak pidana peredaran narkotika berkedok produk makanan/minuman kemasan? 5. Dari kacamata pengawasan BPOM, celah atau kelemahan apa saja dalam rantai pasok/distribusi pangan yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menyamarkan narkotika ke dalam produk makanan olahan dan minuman kemasan? 6. Banyak kasus peredaran makanan mengandung													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				narkotika (seperti cookies ganja) ditransaksikan melalui media sosial/online shop. Bagaimana langkah preventive dan pengawasan patroil siber yang dilakukan BPOM terhadap produk makanan olahan tanpa izin edar (TIE) yang dijual secara dalam jaringan (daring)? 7. Menurut identifikasi BPOM, faktor apa saja (seperti motif keuntungan ekonomi, minimnya edukasi keamanan pangan, atau modus penyamaran) yang menjadi pemicu maraknya peredaran produk pangan terselubung narkotika ini di masyarakat? 8. Langkah strategis atau imbauan apa yang telah dilakukan BPOM untuk												

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				memberikan edukasi/kesadaran kepada masyarakat dan konsumen agar tidak terkecoh serta dapat mengenali ciri-ciri produk makanan/minuman ilegal yang berpotensi mengandung zat berbahaya/narkotika?														
13	10 Agustus 2026				Pelajar/ Mahasiswa	A. Profil & Kewenangan Umum 1. Bisa dijelaskan secara singkat tugas dan kewenangan Bapak/Ibu di BPOM terkait pengawasan iklan produk kosmetik? 2. Bagaimana pembagian tugas antara BPOM Pusat dan BPOM di daerah dalam mengawasi iklan kosmetik? B. Mekanisme Pengawasan Iklan Kosmetik 3. Bagaimana mekanisme pengawasan pra-iklan	Tugas akhir penelitian skripsi	V			V			V	Dikabulkan sepenuhnya		26 Agustus 2026	26 Agustus 2026	0	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				(sebelum iklan ditayangkan) yang diterapkan BPOM terhadap produk kosmetik? 4. Bagaimana mekanisme pengawasan pasca-iklan (setelah iklan beredar di masyarakat), khususnya untuk iklan di media sosial dan e-commerce? 5. Kriteria atau indikator apa yang digunakan BPOM untuk menentukan suatu iklan kosmetik tergolong "menyesatkan"? 6. Apakah ada perbedaan perlakuan pengawasan antara iklan di media konvensional (TV, cetak) dengan iklan di platform digital (Instagram, TikTok, marketplace)? C. Bentuk Pelanggaran yang													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				Ditemukan 7. Bentuk pelanggaran iklan kosmetik menyesatkan apa yang paling sering ditemukan BPOM dalam beberapa tahun terakhir (klaim berlebihan, testimoni palsu, penyembunyian informasi, dll.)? 8. Bagaimana BPOM menyikapi iklan kosmetik yang menggunakan klaim berbau medis (misalnya "menyembuhkan jerawat permanen") padahal produk tersebut berstatus kosmetik, bukan obat? 9. Sejauh mana BPOM menemukan praktik manipulasi foto/video before-after atau testimoni palsu dalam iklan kosmetik?												

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				D. Peran Influencer/Endorser 10. Bagaimana pandangan BPOM terhadap peran influencer atau endorser sebagai bagian dari rantai periklanan produk kosmetik? 11. Apakah BPOM memiliki mekanisme khusus untuk mengawasi konten promosi kosmetik yang dilakukan oleh influencer, termasuk soal keterbukaan hubungan komersial (paid partnership) yang tidak diungkapkan? 12. Menurut Bapak/Ibu, apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup mengatur tanggung jawab influencer/endorser, atau masih ada kekosongan hukum? E. Tanggung Jawab														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*					Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak				Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan						
		[redacted]				& Penegakan Hukum 13. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang dibebankan BPOM kepada pelaku usaha (produsen/distributor) apabila terbukti melakukan iklan kosmetik yang menyesatkan? 14. Sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan BPOM, dan bagaimana proses penjatuhan sanksi tersebut dalam praktik? 15. Apakah BPOM pernah menindak kasus di mana tanggung jawab harus dibagi antara produsen, distributor, dan pihak yang mengiklankan (termasuk influencer)? Bagaimana penyelesaiannya? 16. Bagaimana koordinasi BPOM													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				dengan lembaga lain (BPSK, YLKI, Kominfo, platform digital) dalam menindaklanjuti laporan iklan kosmetik menyesatkan? F. Hambatan Pelaksanaan 17. Apa saja hambatan utama yang dihadapi BPOM dalam mengawasi dan menindak iklan kosmetik menyesatkan, terutama di ranah digital? 18. Apakah keterbatasan sumber daya (personel, anggaran, teknologi) menjadi kendala signifikan dalam pengawasan iklan kosmetik saat ini? 19. Bagaimana BPOM mengatasi kendala yurisdiksi ketika pelaku usaha atau platform berada														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				di luar negeri, sementara iklan tetap menyasar konsumen Indonesia? 20. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apa faktor yang membuat masih banyak masyarakat menjadi korban iklan kosmetik menyesatkan meski regulasi sudah ada? G. Rekomendasi & Penutup 21. Menurut Bapak/Ibu, regulasi apa yang perlu diperkuat atau direvisi untuk mengatasi persoalan iklan kosmetik menyesatkan, khususnya terkait tanggung jawab influencer? 22. Apakah ada rencana atau wacana BPOM untuk membuat aturan khusus mengenai endorsement produk														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
		[redacted]				kosmetik oleh influencer? 23. Apa saran Bapak/Ibu bagi konsumen agar lebih kritis menghadapi iklan kosmetik di media sosial?														
14	20 Agustus 2026				Mahasiswa	1. Jumlah kasus kosmetik 2023–2025/2026 2. Jumlah dan jenis pelanggaran 3. Jumlah barang bukti temuan beserta total nilai ekonomi 4. Jumlah perkara yang ditangani PPNS 5. Status dan hasil penindakan setiap perkara 6. Bentuk sanksi atau tindak lanjut administratif dan pidana 7. Hambatan dan upaya BBPOM dalam penegakan hukum	Digunakan sebagai data penelitian untuk penyusunan Tesis program Magister Ilmu hukum di Universitas Hasanuddin	V			V			V	Dikabulkan sepenuhnya		27 Agustus 2026	27 Agustus 2026	0	-
SEPTEMBER																				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu-naan Informa-si	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputu-san	Alasan Penola-kan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasi-kan	*Softcopy*	*Hardcopy*	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi-tahuan Tertulis	Pem-berian Informasi	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
. NIHIL																				

Makassar, 2 Oktober 2026
Mengetahui,
PPID BBPOM di Makassar
Kepala BBPOM di Makassar

Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt., M.M

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).